

PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET DESA: TINJAUAN SISTEMATIS STUDI INDONESIA DAN LINTAS NEGARA

Tiara Abdurahman¹, Tri Handayani Amaliah², Mahdalena³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

tiaraabdurahman28@mahasiswa.ung.ac.id¹, triamaliah@ung.ac.id²,
mahdalena@ung.ac.id³

Abstract

Village asset management is a critical pillar in achieving effective governance and sustainable rural development. However, numerous studies indicate that asset management practices at the village level, both in Indonesia and other developing countries, continue to face significant structural and operational challenges. This study aims to identify and comparatively analyze the problems and solutions related to village asset management through a Systematic Literature Review (SLR) approach. The findings reveal that key challenges include unclear asset ownership status, weak asset administration, limited human resource capacity, inadequate infrastructure, low community participation, poor reporting discipline, barriers to digitalization, and misalignment of organizational objectives. This study contributes to the literature by offering a cross-country comparative perspective that enhances the understanding of critical success factors in village asset management and provides insights for improving governance practices in rural publik sektor management.

Keyword: *Village Asset Management, Publik Sektor Accounting, Systematic Literature Review*

Abstrak

Pengelolaan aset desa merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa praktik pengelolaan aset desa, baik di Indonesia maupun di berbagai negara berkembang, masih menghadapi tantangan struktural dan operasional yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan permasalahan serta solusi pengelolaan aset desa melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan aset desa mencakup ketidakjelasan status kepemilikan aset, lemahnya penatausahaan, rendahnya kapasitas SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya partisipasi masyarakat, ketidakdisiplinan pelaporan, serta hambatan digitalisasi dan kesenjangan tujuan organisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menghadirkan perspektif komparatif lintas negara untuk memperkuat pemahaman mengenai faktor keberhasilan pengelolaan aset desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset Desa, Akuntansi Sektor Publik, Tinjauan Pustaka Sistematis

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset desa pada dasarnya merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan desa yang berkelanjutan (Adni et al., 2024; Sempa & Fadhila, 2025; Soleman et al., 2024). Secara ideal, aset desa mencakup sumber daya alam, infrastruktur, dan aset budaya yang harus dikelola secara optimal untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing ekonomi lokal, serta mendorong kesejahteraan masyarakat desa (Sempa & Fadhila, 2025; Soleman et al., 2024). Dalam perspektif teoretis, pengelolaan aset yang efisien seharusnya mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, memudahkan proses administrasi melalui pemanfaatan teknologi, dan memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki memberi nilai tambah bagi desa. Optimalisasi

pengelolaan aset juga penting, karena pemerintahan desa memiliki kekayaan yang menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, sehingga aset tersebut semestinya dikelola secara tertib, aman, dan berdayaguna untuk meningkatkan pendapatan desa serta taraf hidup masyarakat (Bafa et al., 2021; Handayani et al., 2023; Sempa & Fadhila, 2025).

Namun pada kenyataannya, berbagai studi menunjukkan bahwa praktik pengelolaan aset, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, masih menghadapi tantangan yang signifikan. Realitas di lapangan memperlihatkan adanya keterbatasan SDM yang kompeten, lemahnya kapasitas teknis dalam penatausahaan aset, serta ketersediaan data yang sering kali tidak akurat atau bahkan tidak ada. Kondisi ini menyulitkan proses penilaian risiko, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya yang efektif (Bafa et al., 2021; Handayani et al., 2023; Sempa & Fadhila, 2025; Soleman et al., 2024). Desa juga masih menghadapi hambatan berupa lemahnya sistem informasi, kurangnya transparansi, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan aset. Fenomena serupa muncul dalam konteks internasional, misalnya pada pengelolaan aset para pengelola harus menyeimbangkan tujuan strategis aset dengan keterbatasan keuangan, teknologi, SDM, sehingga menciptakan kesenjangan antara kebutuhan ideal pengelolaan aset (Adni et al., 2024; Musiimenta et al., 2023).

Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa masih jauh dari efektif. Walaupun aset desa memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian lokal, ketidaksiapan struktural dan kelemahan tata kelola menciptakan risiko aset tidak termanfaatkan, hilang, atau tidak memberi kontribusi optimal terhadap pendapatan desa, yang di mana masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga tercermin dalam berbagai studi lintas negara (Adni et al., 2024; Soleman et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara sistematis permasalahan pengelolaan aset desa dengan membandingkan temuan studi-studi di Indonesia dan penelitian internasional terkait pengelolaan aset di tingkat pedesaan. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesamaan pola masalah, perbedaan konteks struktural, serta faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan pengelolaan aset di tingkat desa. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada kasus di satu wilayah atau satu negara, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan perspektif komparatif lintas negara. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola universal dalam permasalahan pengelolaan aset desa sekaligus mengungkap karakteristik khusus yang hanya muncul dalam konteks Indonesia.

METODE PENELITIAN

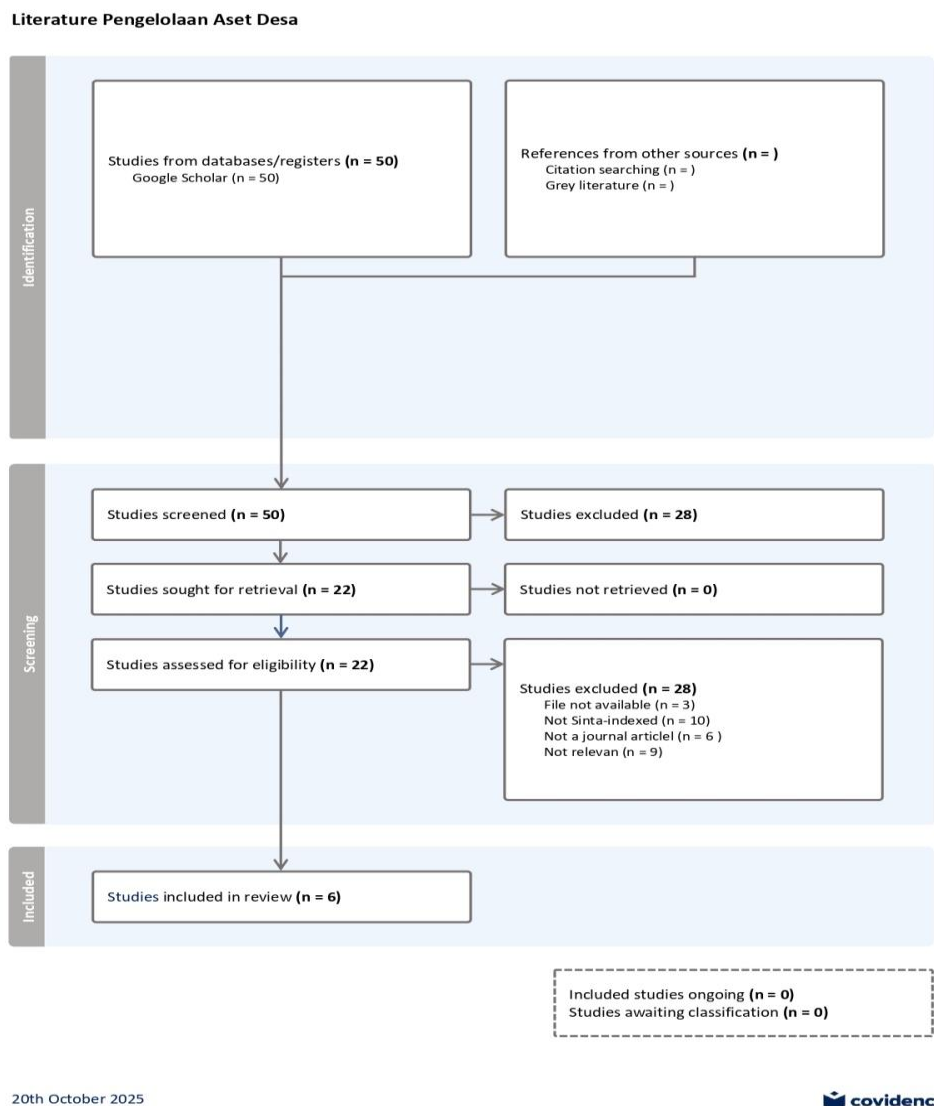
Systematic Literature Review atau tinjauan pustaka literatur menjadi metode dalam penelitian ini. *Systematic Literature Review* (SLR) merupakan metode dengan mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan pada suatu topik

penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian (*Research question*) (Kitchenham & Charters, 2007).

Pengumpulan data penelitian menggunakan *softcopy edition* yang proses pencarian (*search process*) dengan memanfaatkan tools *Perish Or Publish* pada Google Scholar dengan kata kunci “Pengelolaan Aset Desa” atau “Asset Management Village” pada periode 2021-2025. Setelah itu dilakukan filterisasi pada *Covidence* berdasarkan Judul, Abstrak dan Full text, sehingga dari 50 artikel menjadi 6 artikel yang relevan. Berdasarkan literature yang ditemukan peneliti merumuskan *research question* sebagai berikut :

RQ1 : Apa saja permasalahan pengelolaan aset desa di Indonesia dan lintas negara sesuai literature yang ditemukan?

RQ2 : Bagaimana solusi dari permasalahan pengelolaan aset desa di Indonesia dan lintas negara sesuai literature yang ditemukan?



Gambar 1. Prisma Literatur Review Pengelolaan Aset Desa

LANDASAN TEORETIS

Teori Stewardship dalam Pengelolaan Aset Desa

Teori Stewardship memandang aparaturnya pemerintah sebagai pihak yang bertindak pengelola (*steward*) yang secara inheren termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi dan kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan pribadi (Davis et al., 1997). Kepala desa beserta perangkat desa dipandang sebagai *steward* yang diberi mandat untuk mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Stewardship Theory juga relevan dalam menjelaskan pengelolaan aset desa. Qian & Xu, (2025) menjelaskan aset desa merupakan sumber daya publik yang harus dijaga, dimanfaatkan, dan dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Sebagai *steward*, pemerintah desa bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan aset mulai dari perencanaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pelaporan dilaksanakan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan desa, teori ini menekankan pentingnya kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab aparaturnya desa dalam mengelola aset publik agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ketidakefektifan pengelolaan aset desa yang ditemukan dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik stewardship belum berjalan optimal, terutama akibat keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya sistem administrasi, serta kurangnya dukungan teknologi informasi (Sempa & Fadhila, 2025; Soleman et al., 2024)

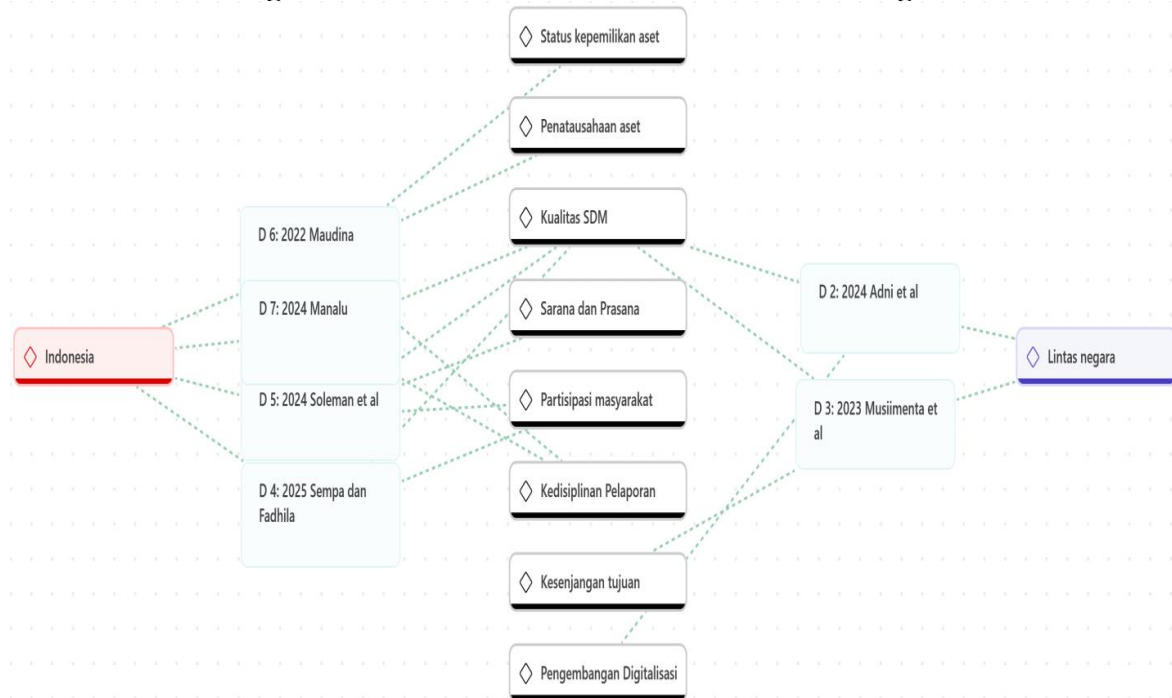
Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Agustina & Gunawan, 2025). Dalam perspektif akuntansi sektor publik, pengelolaan dana desa merupakan bentuk pengelolaan keuangan publik yang menuntut penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Rohaeni (2024) menjelaskan pemerintah desa dituntut mampu merencanakan penggunaan dana sesuai kebutuhan masyarakat, melaksanakan program secara efektif, melakukan penatausahaan yang tertib, menyusun laporan keuangan yang andal, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan desa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh integritas, kompetensi, komitmen pelayanan publik, serta kemampuan aparaturnya desa dalam menciptakan nilai bagi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Pengelolaan Aset Desa di Indonesia dan Lintas Negara



Gambar 2. Pemetaan Permasalahan Pengelolaan Aset Desa Di Indonesia dan Lintas Negara

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap enam artikel terpilih, penelitian ini mengidentifikasi delapan tema utama permasalahan pengelolaan aset desa, yaitu: (1) ketidakjelasan status kepemilikan aset, (2) lemahnya penatausahaan aset, (3) rendahnya kapasitas sumber daya manusia, (4) keterbatasan sarana dan prasarana, (5) rendahnya partisipasi masyarakat, (6) ketidakdisiplinan pelaporan aset, (7) hambatan digitalisasi, dan (8) ketidaksinkronan tujuan organisasi.

Permasalahan pertama yang ditemukan adalah terkait ketidakjelasan aset desa. Maudina & Nugraha, (2022) mengungkapkan bahwa banyak aset desa, terutama tanah, belum memiliki legalitas yang lengkap, seperti sertifikat atau dokumen pendukung lain yang sah. Ketidakpastian status hukum ini menjadikan aset desa rentan terhadap sengketa, tumpang tindih klaim, dan pada akhirnya menghambat pemanfaatan dalam pembangunan desa. Ketidakjelasan kepemilikan ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga mengurangi kemampuan desa dalam mengembangkan aset sebagai sumber pendapatan asli desa atau sebagai pendukung program pembangunan jangka panjang.

Selain masalah kepemilikan, penatausahaan aset juga muncul sebagai isu kritis yang ditemukan dalam penelitian (Maudina & Nugraha, 2022) yang menunjukkan bahwa pencatatan aset desa masih dilakukan secara tidak tertib, tidak terstandarisasi, dan sering kali tidak diperbarui sesuai kondisi terbaru di lapangan. Dalam beberapa kasus, aset tidak tercatat sama sekali, atau terdapat ketidaksesuaian antara fisik dan data

administrasi. Terdapat aset yang tercatat tetapi tidak ditemukan, maupun aset yang ada namun tidak masuk dalam daftar inventaris. Hal ini menciptakan kesulitan dalam proses audit, pelaporan, serta pemantauan aset, sehingga meningkatkan risiko kehilangan aset, atau kerusakan yang tidak terdokumentasi, dan ketidakmampuan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pemanfaatan yang tepat sasaran.

Temuan selanjutnya mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan paling dominan dalam pengelolaan aset desa. Sejumlah penelitian di Indonesia (Ade Amelia Manalu & Ivan Yudianto, 2023; Sempa & Fadhila, 2025; Soleman et al., 2024) menyoroti rendahnya kompetensi teknis desa. Khususnya, dalam bidang akuntansi pemerintah, sistem informasi aset, dan teknik analisis pengelolaan aset. Keterbatasan ini menyebabkan pengelolaan aset desa tidak dilakukan secara profesional, sering terjadi kesalahan pencatatan, dan kurangnya perencanaan berbasis data. Rendahnya kapasitas SDM ini juga berpengaruh pada ketidakmampuan pemerintah desa dalam memahami regulasi, mengelola risiko aset, dan menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Pada studi lintas negara, (Adni et al., 2024; Musiimenta et al., 2023) memperlihatkan bahwa isu serupa terjadi di negara berkembang lainnya, di mana keterbatasan tenaga ahli, minimnya pelatihan, dan rendahnya literasi digital menjadi faktor yang menghambat praktik pengelolaan aset secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masalah SDM merupakan isu universal yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan tantangan global dalam tata kelola aset publik di wilayah pedesaan.

Selain faktor SDM, sarana dan prasarana juga menjadi poin penting dalam permasalahan pengelolaan aset. Hasil penelitian Soleman et al., (2024) menunjukkan bahwa banyak desa di Indonesia belum memiliki perangkat teknologi yang memadai, termasuk aplikasi sistem informasi aset, computer yang layak, maupun fasilitas penyimpanan dokumen yang aman. Akibatnya, penatausahaan aset masih dilakukan secara manual, menyebabkan rawan terjadi kesalahan, ketidakaturan, dan duplikasi data. Kekurangan infrastruktur ini juga berdampak pada proses pemutakhiran data yang berjalan lambat dan tidak konsisten. Selain itu, penelitian yang sama menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemanfaatan dan pengawasan aset desa masih rendah. Minimnya pelibatan masyarakat membuat proses pengelolaan aset kurang transparan dan tidak responsif terhadap kebutuhan warga. Partisipasi yang rendah juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, kurangnya pengawasan sosial, dan berkurangnya rasa memiliki terhadap aset publik.

Kedisiplinan pelaporan merupakan isu lain yang sering muncul dalam literatur Indonesia. Sempa & Fadhila, (2025) menegaskan bahwa banyak desa tidak konsisten dalam menyusun laporan aset secara berkala. Laporan yang tidak lengkap, terlambat, atau bahkan tidak disusun sama sekali menjadi hambatan bagi proses audit dan pembinaan dari instansi pengawas. Ketidaksiplinan ini menciptakan masalah lanjutan berupa munculnya temuan kesalahan administrasi, lemahnya akuntabilitas pemerintah desa, serta keterbatasan data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Ketidaksiplinan pelaporan juga memperburuk ketidakaturan penatausahaan, karena

laporan berkala seharusnya menjadi instrumen penting untuk memastikan validitas dan akurasi data aset desa.

Pada konteks internasional, dua temuan penting menonjol, yaitu kesenjangan tujuan (*goal misalignment*) dan hambatan digitalisasi. (Musiimenta et al., 2023) menunjukkan bahwa pengelola utilitas publik di beberapa negara menghadapi tekanan untuk mencapai tujuan strategis organisasi, seperti peningkatan layanan dan keberlanjutan aset, namun kapasitas teknis dan kualitas data aset tidak mendukung pencapaian tujuan tersebut. Kesenjangan antara tuntutan institusi dan kemampuan teknis ini menyebabkan pengelolaan aset berjalan tidak efektif dan tidak sejalan dengan kebutuhan operasional. Sementara itu, Adni et al., (2024) menemukan bahwa desa-desa di Uganda belum memiliki infrastruktur digital yang memadai. Keterbatasan ini menghambat transformasi digital, termasuk penggunaan aplikasi pengelolaan aset, integrasi data, dan sistem pelaporan elektronik. Lambatnya digitalisasi juga berdampak pada sulitnya mengakses informasi, rendahnya transparansi, serta tingginya ketergantungan pada metode manual yang rawan kesalahan.

Secara keseluruhan, hasil SLR ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan aset desa bersifat multidimensi dan saling terkait. Permasalahan administratif seperti legalitas dan penatausahaan berpadu dengan kelemahan struktural seperti rendahnya SDM, minimnya infrastruktur, serta tantangan digitalisasi dan kesenjangan tujuan organisasi. Pola ini konsisten ditemukan baik dalam studi Indonesia maupun studi lintas negara, sehingga menegaskan bahwa pengelolaan aset desa merupakan isu global yang membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek regulasi, kapasitas, teknologi, dan partisipasi masyarakat

Solusi Permasalahan Pengelolaan Aset Desa di Indonesia dan Lintas Negara

Hasil analisis literature menunjukkan bahwa solusi pengelolaan aset desa di Indonesia dan lintas negara menekankan pentingnya integrasi antara teknologi, peningkatan kapasitas aparatur (SDM), penguatan tata kelola, dan pelibatan masyarakat sebagai elemen utama dalam perbaikan sistem pengelolaan aset desa. Salah satu solusi strategis yang muncul dalam literatur adalah pengembangan sistem informasi berbasis aplikasi untuk mempermudah penatausahaan aset secara menyeluruh. Khususnya yang ditemukan pada studi lintas negara (Adni et al., 2024) menegaskan bahwa sistem informasi aset desa perlu dirancang untuk mencatat aset mulai dari tahap perencanaan, penyimpanan, pengelolaan, hingga pelaporan secara lengkap. Pemanfaatan aplikasi ini membantu aparatur desa dalam menjaga ketertiban administrasi, tetapi juga meminimalkan risiko kehilangan aset desa serta memudahkan penyusunan laporan aset yang akurat dan berkala.

Solusi berikut menekankan peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur desa. Adni et al., (2024) menegaskan bahwa pelatihan inventarisasi dan manajemen aset dapat meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pentingnya pengelolaan aset yang rapi dan tertib. Hal ini sejalan dengan (Sempa & Fadhila, 2025) bahwa profesionalisme aparatur desa bukan hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari kemampuan

memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan dan program. Sempa & Fadhila, (2025) juga mengungkapkan bahwa semakin tinggi profesionalisme aparatur dalam mengelola aset, semakin besar peluang peningkatan pendapatan desa, sehingga peningkatan kapasitas SDM menjadi solusi yang memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan desa.

Solusi berikutnya berfokus pada pelibatan masyarakat sebagai mekanisme akuntabilitas sosial, yang sejalan dengan teori agensi. Soleman et al., (2024) mengungkapkan bahwa pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan. Pelibatan masyarakat akan meningkatkan transparansi, mengurangi potensi penyalahgunaan aset, serta memastikan bahwa penggunaan aset desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga memperkuat legitimasi kebijakan desa dan meningkatkan efektivitas implementasi program berbasis aset.

Pada konteks global, literatur (Adni et al., 2024; Musiimenta et al., 2023) menawarkan refleksi tambahan berupa solusi harmonisasi tujuan strategis organisasi dengan kapasitas pengelola aset. Banyak pengelola aset di negara berkembang menghadapi tekanan untuk mencapai target strategis, namun minim dukungan data dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian tujuan dengan kapasitas teknis yang realistis serta pengembangan alat pendukung keputusan yang mampu mengarahkan pengelolaan aset secara lebih terukur. Solusi ini menegaskan bahwa digitalisasi saja tidak cukup tanpa adanya keselarasan antara kebijakan, kapasitas teknis, dan arah pembangunan desa.

Secara keseluruhan, solusi pengelolaan aset desa yang ditemukan dalam literatur menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset tidak bergantung pada satu faktor tunggal, melainkan pada kombinasi antara penguatan sistem informasi, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengendalian, penatausahaan yang tertib, partisipasi masyarakat, serta harmonisasi tujuan organisasi. Penerapan solusi ini secara terpadu berpotensi menghasilkan tata kelola aset desa yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel baik di Indonesia maupun di desa-desa negara berkembang lainnya.

KESIMPULAN

Pengelolaan aset desa baik di Indonesia maupun dalam konteks lintas negara masih menghadapi persoalan struktural dan manajerial yang relatif serupa, terutama terkait kepastian hukum aset, kapasitas pengelola, efektivitas sistem penatausahaan, dan keterpaduan tujuan organisasi. Melalui pendekatan SLR peneliti menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan aset desa tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh keselarasan antara kerangka regulasi, kompetensi SDM, dukungan teknologi, dan mekanisme akuntabilitas sosial. Kontribusi utama terletak pada penyajian komparatif lintas negara yang memperkaya pemahaman teoretis tentang faktor kunci pengelolaan aset desa serta mengidentifikasi pola solusi yang bersifat universal dan kontekstual. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan

model pengelolaan aset desa berbasis tata kelola modern dan teknologi informasi yang berorientasi pada transparansi, profesionalisme, serta peningkatan kontribusi aset terhadap pembangunan dan pendapatan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Amelia Manalu, & Ivan Yudianto. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Kabupaten Bandung Barat. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 55–73. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1911>
- Adni, D. F., Shasrini, T., & Fadzil, F. (2024). *International community service collaboration: Recommendations for village asset management in Kedah , Malaysia*. 5(2), 383–391. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jcse.v5i2.29503>
- Agustina, P., & Gunawan, B. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/rabin.v9i3.30723>
- Bafa, H., Erawati, T., & Primastiwi, A. (2021). *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku*. 3(September), 167–186.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*. <https://doi.org/https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9707180258>
- Handayani, E. S., Azhsaari, I. P., & Fitriana, N. (2023). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 452. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v7i1.2487>
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. https://www.researchgate.net/publication/302924724_Guidelines_for_performing_Systematic_Literature_Reviews_in_Software_Engineering
- Maudina, Y., & Nugraha, A. A. (2022). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Tanah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Tanah (Survei Pada OPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 143–151. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3393>
- Musiimenta, B. E., Tutusaus, M., & Schwartz, K. (2023). *The practice of integrated asset management in Ugandan small towns*. 25(3), 237–252. <https://doi.org/10.2166/wp.2023.213>
- Qian, X., & Xu, K. (2025). How village leaders behave in leading vernacular heritage-based rural regeneration in traditional villages, agent or steward? Field research in traditional villages of the southeast of Chongqing, China. *Science Direct Habitat International*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2024.103257>

- Rohaeni, S. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang). *Review of Accounting and Bussines*. <https://doi.org/https://doi.org/10.52250/reas.v4i1.775>
- Sempa, C., & Fadhila, Z. R. (2025). Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Bumdes dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6901–6910. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8424>
- Soleman, U. O., Monoarfa, R., & Wuryandini, A. R. (2024). Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 273–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i1.920>